

Nama : Rahma Noviyana

NPM : 2313031060

Kelas : 23C

Pertemuan 11

CASE STUDY

1. Analisis Struktur Pengeluaran

Jika dilihat dari strukturnya, belanja pendidikan di Nusantara Raya sebenarnya sudah besar, tapi belum efisien secara kualitas. Porsi 68% untuk gaji dan tunjangan guru terlalu dominan, sementara hasil pendidikan (literasi dan numerasi) masih rendah. Ini menunjukkan bahwa pengeluaran belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan output pendidikan. Selain itu, masalah utamanya ada pada distribusi yang tidak merata. Di kota terjadi kelebihan guru, sedangkan di daerah terpencil justru kekurangan. Artinya, anggaran besar tersebut tidak digunakan secara optimal. Sementara itu, alokasi untuk infrastruktur (12%) dan bantuan siswa (8%) masih tergolong kecil, padahal dua aspek ini sangat penting untuk pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Karena itu, perlu dilakukan **realokasi anggaran**, terutama dengan meningkatkan porsi untuk infrastruktur dan digitalisasi, serta bantuan siswa. Di sisi lain, belanja gaji tidak harus dikurangi secara langsung, tetapi dibuat lebih efisien melalui redistribusi guru dan pengelolaan yang lebih baik.

2. Analisis Sumber Pembiayaan

Saat ini, pembiayaan pendidikan di Nusantara Raya masih sangat bergantung pada APBD. Ketergantungan ini membuat ruang gerak pemerintah terbatas, terutama ketika ingin melakukan inovasi seperti digitalisasi atau peningkatan kualitas guru secara besar-besaran. Oleh karena itu, perlu ada diversifikasi sumber pembiayaan. Pemerintah bisa mulai melibatkan sektor swasta melalui skema seperti kerja sama pembangunan (PPP), pemanfaatan dana CSR, atau program kolaborasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi. Misalnya, perusahaan bisa membantu penyediaan fasilitas digital atau pelatihan keterampilan. Namun, dalam penerapannya tetap harus dijaga agar tidak terjadi komersialisasi pendidikan. Pemerintah tetap harus menjadi aktor utama, sementara swasta berperan sebagai pendukung.

3. Perbandingan dengan Negara OECD

Beberapa praktik dari negara OECD sebenarnya cukup relevan untuk diterapkan. Misalnya, penggunaan performance-based budgeting, di mana anggaran diberikan berdasarkan kinerja sekolah. Selain itu, pendekatan berbasis kebutuhan siswa juga penting, karena kondisi setiap daerah berbeda. Negara OECD juga sangat menekankan pada kualitas guru dan penggunaan data dalam evaluasi pendidikan. Ini bisa menjadi contoh yang baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Nusantara Raya.

Namun, tantangannya di Indonesia cukup besar. Salah satunya adalah keterbatasan data yang akurat dan merata, terutama di daerah terpencil. Selain itu, kesiapan SDM dan birokrasi juga masih perlu ditingkatkan. Tidak semua pihak siap dengan sistem berbasis kinerja, sehingga bisa muncul resistensi dalam implementasinya.

4. Rancangan Reformasi (5 Tahun)

Dalam jangka waktu 5 tahun, reformasi pembiayaan pendidikan di Nusantara Raya perlu dirancang secara bertahap dan terarah dengan fokus pada empat aspek utama, yaitu struktur belanja, kualitas guru, digitalisasi, serta monitoring dan evaluasi.

a. Perubahan Struktur Belanja

Pemerintah perlu melakukan penyesuaian komposisi anggaran agar lebih seimbang dan berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Porsi belanja gaji dan tunjangan tetap dipertahankan tetapi dibuat lebih efisien melalui redistribusi guru. Secara bertahap, alokasi untuk infrastruktur dan digitalisasi perlu ditingkatkan, begitu juga dengan bantuan siswa agar akses pendidikan lebih merata. Sementara itu, belanja administrasi harus ditekan agar tidak membebani anggaran.

b. Strategi Peningkatan Kualitas Guru

Fokus utama ada pada peningkatan kompetensi dan pemerataan guru. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran. Selain itu, perlu diberikan insentif khusus bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil. Evaluasi kinerja guru juga perlu dikaitkan dengan hasil belajar siswa agar lebih terukur.

c. Digitalisasi Sekolah

Digitalisasi menjadi prioritas untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan. Program yang dilakukan meliputi penyediaan internet di sekolah, pengadaan perangkat pembelajaran digital, serta pengembangan platform pembelajaran. Selain itu, guru dan siswa juga perlu dibekali kemampuan literasi digital agar pemanfaatannya efektif.

d. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Pemerintah perlu membangun sistem evaluasi berbasis data yang berkelanjutan. Monitoring tidak hanya berfokus pada penggunaan anggaran, tetapi juga pada hasil belajar siswa seperti literasi dan numerasi. Selain itu, transparansi laporan dan pelibatan pemerintah daerah penting untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan dan dapat dievaluasi secara berkala.